

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kepemimpinan merupakan suatu hal yang fundamental dalam kehidupan politik dan penyelenggaraan negara. Keberlangsungan suatu pemerintahan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan. Dalam konteks ini, kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola sebuah negara melainkan juga berkaitan erat dengan persoalan etika, tanggung jawab moral, serta orientasi kepemimpinan terhadap kepentingan masyarakat luas. Suatu daerah yang dipimpin oleh pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan yang baik dan inovatif secara langsung dapat menjadikan daerah yang dipimpinnya menjadi berhasil (Setiawan & Fauzi, 2019).

Seiring perkembangan politik modern, terutama di negara-negara demokrasi, kepemimpinan semakin dihadapkan dengan tuntutan elektoral yang kuat. Sistem demokrasi elektoral menempatkan pemilihan umum sebagai mekanisme utama legitimasi kekuasaan. Akibatnya, keberhasilan seorang pemimpin seringkali diukur dari elektabilitas, yakni kemampuan untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan politik masyarakat. Padahal, dalam perspektif ilmu politik, kepemimpinan tidak hanya dinilai dari efektivitas program kerja semata, tetapi juga dari dimensi etis yang mencakup integritas, akuntabilitas, dan legitimasi moral seorang pemimpin (Budiardjo, 2007).

Elektabilitas kemudian menjadi faktor dominan dalam melihat kualitas dari seorang pemimpin, serta dimensi etikabilitas yang mencakup keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral cenderung diposisikan sebagai aspek sekunder. Fenomena ini melahirkan permasalahan serius dalam praktik kepemimpinan politik. Ketika elektabilitas menjadi tujuan utama, khawatir kebijakan politik disusun bukan berdasarkan pertimbangan etis dan kebutuhan jangka panjang masyarakat, melainkan berdasarkan kalkulasi politik jangka pendek. Praktik populisme, pencitraan berlebihan, kompromi dengan kepentingan elit serta pragmatisme kekuasaan menjadi praktik yang sangat sulit dihindari (Syarofuzzaman, 2024).

Permasalahan ini menunjukkan bahwa krisis kepemimpinan politik dewasa ini tidak semata-mata disebabkan oleh lemahnya institusi demokrasi, tetapi juga ketegangan antara elektabilitas dan etikabilitas. Kekuasaan yang sah secara prosedural belum tentu sah secara moral. Sebaliknya, kepemimpinan yang ideal secara etis sering kali kesulitan untuk mempertahankan substansinya dalam kerasnya kompetisi politik elektoral. Ketegangan inilah yang menjadi problem mendasar dalam kajian etika kepemimpinan politik kontemporer.

Dalam sejarah peradaban manusia para pemikir telah lama memperdebatkan kedua hal tersebut yaitu kekuasaan dan moral. Apakah seorang pemimpin harus selalu mengedepankan moralitas ataukah dalam kondisi tertentu seorang pemimpin boleh bersikap pragmatis demi mempertahankan negara. Ketegangan antara tuntutan moral dan realitas kekuasaan inilah yang menjadi etika kepemimpinan sebagai topik penting untuk dikaji secara mendalam.

Dalam tradisi pemikiran politik Barat, salah satu tokoh yang banyak membahas hubungan antara etika dan kekuasaan adalah Niccolo Machiavelli. Melalui karyanya yang sangat terkenal yaitu *Il Principe (The Prince)*, Machiavelli sebagai tokoh yang secara radikal mengubah cara pandang terhadap hubungan etika dan politik. Ia memandang bahwa politik memiliki logikanya tersendiri yang ditentukan oleh realitas konflik, ketidakpastian, dan perebutan kekuasaan. Berbeda dengan pandangan idealistik yang berusaha untuk menyamakan politik dan moralitas. Dalam kerangka Machiavelli seorang pemimpin tidak sepenuhnya dapat terikat dengan moralitas ideal, melainkan harus mampu menyesuaikan tindakan politiknya dengan situasi dan kondisi yang dihadapi bahkan jika keputusan itu bertentangan dengan nilai moral konvensional. Karena menurutnya keberhasilan seorang pemimpin sangat ditentukan dari hasil serta efektivitas tindakan politik (Machiavelli, 1532).

Pandangan Machiavelli sering dianggap kontroversial karena dianggap melegitimasi atau membenarkan tindakan-tindakan keras dalam politik. Namun demikian, pemikirannya masih sangat relevan karena memberikan gambaran tentang bagaimana politik yang sebenarnya, bukan bagaimana politik seharusnya. Machiavelli menawarkan perspektif yang lebih realistis tentang kepemimpinan dan

politik yang sering dianggap kontroversial (Aditya, 2024).

Machiavelli menunjukkan bahwa etika kepemimpinan tidak selalu dapat dipahami secara normatif-moral, melainkan harus dilihat dari kerangka politik yang konkret. Dari sinilah cikal bakal pandangan realisme politik lahir, yaitu cara pandang yang mengesampingkan etika dan moral namun lebih menekankan efektivitas serta stabilitas. Oleh karena itu pemikiran Machiavelli sering digunakan sebagai lensa analisis untuk memahami praktik kepemimpinan politik modern.

Berbeda dengan Machiavelli, dalam tradisi pemikiran politik Islam menempatkan etika sebagai fondasi utama daripada kepemimpinan. Kepemimpinan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan sesuai dengan nilai-nilai agama dan moral. Salah satu tokoh penting dalam tradisi ini adalah Imam Al-Mawardi, melalui karyanya *Al-Ahkam as-Sulthaniyyah* membahas secara sistematis konsep kepemimpinan, kekuasaan, dan tata kelola pemerintahan. Al-Mawardi menegaskan bahwa tujuan utama dari kekuasaan adalah menjaga agama dan mengatur urusan duniawi agar tercapainya kemaslahatan umat (Al-Mawardi, 2014).

Dalam pemikiran Al-Mawardi, etika kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan. Seorang pemimpin tidak hanya dituntut untuk efektif dalam menjalankan pemerintahan melainkan juga harus memiliki integritas dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang dipimpinnya. Kekuasaan yang dijalankan tanpa etika dipandang kehilangan legitimasi moral dan berpotensi menimbulkan kezaliman (Al-Mawardi, 2014).

Relevansi pemikiran Al-Mawardi dalam konteks keindonesiaan sangatlah signifikan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan nilai-nilai Islam memiliki pengaruh besar dalam wacana politik nasional. Konsep-konsep seperti *syura* (musyawarah), keadilan (*al-adl*), dan amanah senantiasa menjadi rujukan dalam diskursus kepemimpinan (Muhajir, 2023).

Perbedaan pendekatan antara Machiavelli dan Al-Mawardi menunjukkan dua paradigma besar dalam memahami etika kepemimpinan politik. Machiavelli merepresentasikan pendekatan realisme politik yang menekankan efektivitas, stabilitas, dan kekuatan kekuasaan. Sementara itu, al-Mawardi mewakili pendekatan normatif religius yang menempatkan etika sebagai fondasi utama

kepemimpinan. Meskipun berasal dari tradisi pemikiran yang berbeda, keduanya sama-sama memberikan kontribusi penting dalam memahami hakikat kepemimpinan politik.

Fenomena ini mendapatkan perhatian lagi setelah Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden untuk periode 2024-2029. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara atau 58,59% dari total suara sah nasional sehingga ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden Tahun 2024. Pencalonan Gibran sendiri dimungkinkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurunkan batas usia minimum calon wakil presiden, sebuah putusan yang memicu perdebatan luas di kalangan akademisi dan masyarakat sipil tentang etika konstitusional.

Prabowo-Gibran mengusung visi "Indonesia Emas 2045" dengan misi mempercepat pembangunan, memperkuat pertahanan negara, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun sebagaimana lazimnya setiap pemerintahan baru, kebijakan-kebijakan awal yang diambil selalu menghadirkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Program makan bergizi Gratis (MBG), Koprasi Desa Merah Putih, hingga pembentukan Kabinet Merah Putih yang mengakomodasi hampir seluruh kekuatan politik termasuk partai oposisi sebelumnya, serta retorika persatuan nasional, mencerminkan corak kepemimpinan yang khas (Kustiawan, 2025). Gaya kepemimpinan Prabowo yang tegas dan berorientasi hasil serta latar belakang militer sekaligus membuka ruang analisis dari dua lensa yang berbeda. Pragmatisme politik ala Machiavelli di satu sisi, dan nilai kepemimpinan amanah ala Al-Mawardi di sisi yang lain.

Upaya untuk merangkul hampir semua kekuatan politik dalam satu koalisi besar dianggap sebagai strategi untuk membangun pemerintahan yang kuat dan solid. Menurut pandangan Machiavelli hal ini diperbolehkan karena dianggap sebagai strategi untuk mencegah konflik politik yang berkepanjangan, hanya saja akan melahirkan kritik bahwa pendekatan semacam ini berpotensi untuk melemahkan bahkan mematikan fungsi oposisi dan prinsip *check and balances*

yang menjadi ruh daripada demokrasi. Demokrasi merupakan simbol peradaban modern oleh bangsa-bangsa di dunia (Gani, 1984).

Kondisi tersebut menjadikan pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai konteks empiris yang relevan untuk mengkaji etika kepemimpinan politik. Pemerintahan ini juga dapat diartikan sebagai contoh konkret tentang bagaimana ketegangan antara elektabilitas dan etikabilitas bekerja dalam praktik. Dengan menggunakan pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi sebagai kerangka analitis, penelitian ini berupaya menelaah apakah praktik kepemimpinan yang muncul mencerminkan realisme politik yang pragmatis, ataupun masih berupaya menjaga dimensi etika dan moral dalam pengelolaan kekuasaan.

Namun demikian, mengingat pemerintahan Prabowo-Gibran masih berada pada tahap awal, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian menyeluruh atau kesimpulan final mengenai keberhasilan atau kegagalan kepemimpinan tersebut. Penelitian ini dibatasi pada analisis awal terhadap etika kepemimpinan, dengan menelaah kecenderungan dan orientasi kepemimpinan berdasarkan kerangka pemikiran Machiavelli dan Al-Mawardi. Pendekatan ini dipilih agar penelitian tetap berada dalam koridor akademik, normatif, dan sesuai dengan ruang lingkup penelitian skripsi.

Kajian mengenai etika kepemimpinan Prabowo-Gibran melalui perspektif Machiavelli dan Al-Mawardi diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik kepemimpinan politik kontemporer. Dengan menggunakan dua tradisi pemikiran yang berbeda, penelitian ini tidak hanya melihat kepemimpinan dari satu sudut pandang, tetapi juga mencoba menghadirkan dialog antara realisme politik dan etika normatif dalam membaca dinamika kepemimpinan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji konsep etika kepemimpinan dalam pemikiran Niccolo Machiavelli dan Imam Al-Mawardi serta relevansinya dalam membaca praktik kepemimpinan politik di Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya membahas teori Machiavelli dan membahas politik Islam tanpa bersentuhan langsung dengan realitas kekuasaan modern. Padahal dalam kondisi politik yang dinamis seperti

Indonesia pendekatan filosofis yang memadukan keduanya menjadi sangat relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan kajian filsafat politik dan pemikiran politik Islam, sekaligus menjadi refleksi praktis bagi etika kepemimpinan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah pada penelitian ini berfokus pada analisis pemikiran politik Niccolo Machiavelli dan Imam Al-Mawardi terhadap pemerintahan Prabowo Gibran. Pertanyaan pada penelitian ini mencakup beberapa persoalan yang relevan, pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep etika kepemimpinan dalam pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi?
2. Apa persamaan dan perbedaan antara pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi terkait etika kepemimpinan?
3. Bagaimana analisis awal etika kepemimpinan Prabowo-Gibran ditinjau dari perspektif Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Umumnya, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis etika kepemimpinan dalam pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi lalu mengaitkannya dengan konteks pemerintahan Prabowo-Gibran. Secara spesifik, penelitian bertujuan untuk :

1. Mendeskripsikan konsep etika kepemimpinan dalam pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi
2. Menemukan persamaan dan perbedaan antara pemikiran Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi terkait etika kepemimpinan
3. Menganalisis etika kepemimpinan Prabowo-Gibran ditinjau dari perspektif Niccolo Machiavelli dan Al-Mawardi

Penelitian ini akan menekankan penerapan nilai, strategi, serta arah kebijakan yang diterapkan. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi yang berguna, baik secara teori maupun praktik. Berikut adalah penjelasan mengenai manfaat tersebut:

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan untuk perkembangan studi mengenai filsafat politik. Terutama, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan dua tradisi pemikiran besar, yaitu Barat dan Islam, yang selama ini dipahami secara terpisah. Penelitian ini menghadirkan kerangka analisis baru yang bersifat integratif. Kerangka ini menghubungkan pendekatan realistik dan pragmatis dalam strategi kekuasaan dengan pendekatan normatif dan etis berdasar pada ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya menambah kekayaan teori dalam disiplin ilmu politik Islam dan filsafat politik, tetapi juga menciptakan ruang pemahaman baru tentang penerapan teori-teori tersebut untuk menganalisis dinamika politik saat ini.

Selain itu, studi ini menawarkan alternatif paradigma akademik bagi penelitian-penelitian mendatang yang ingin menyelaraskan dialog antara pemikiran Barat dan tradisi politik Islam dalam kerangka pemerintahan modern di negara-negara yang mayoritas Muslim.

Penelitian ini juga memperkaya literatur terkait pemerintahan Indonesia saat ini melalui sudut pandang filsafat politik. Dengan begitu, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi akademisi dan mahasiswa untuk mengembangkan studi yang sejenis.

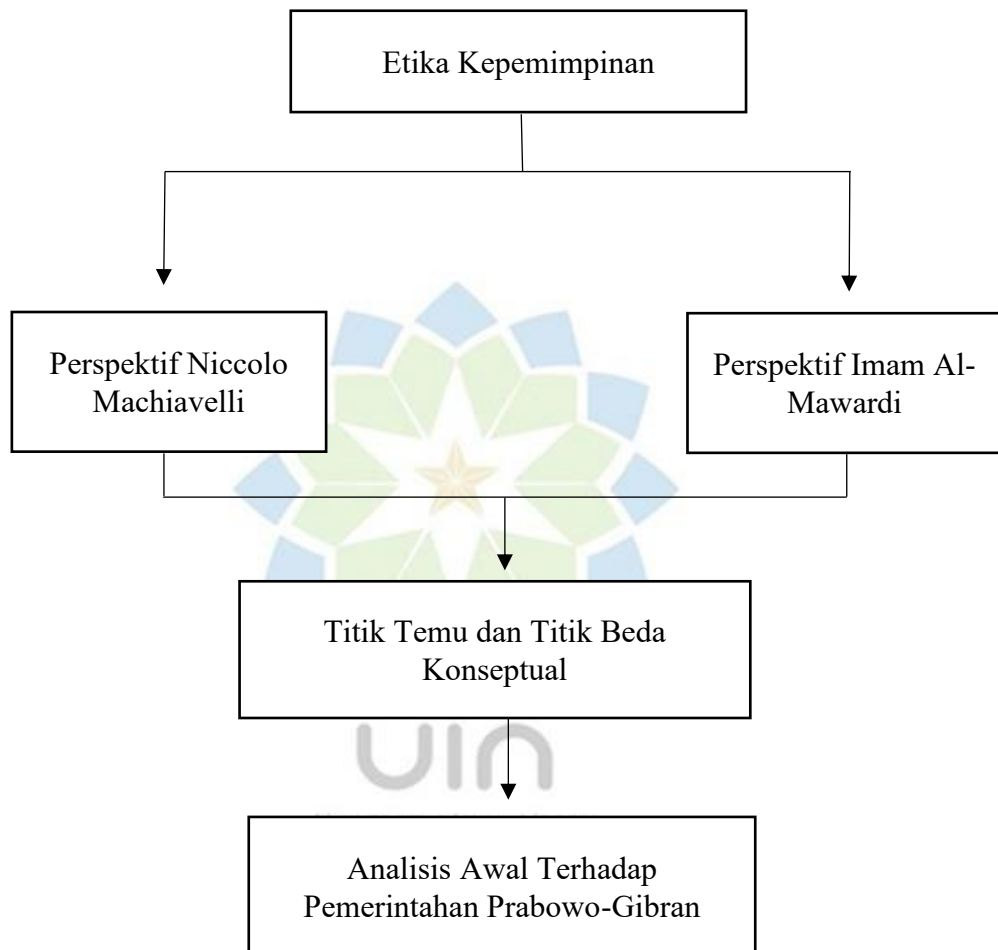
2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan dengan dinamika pemerintahan dan kehidupan politik nasional. Bagi para penghasil kebijakan serta pemerintah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana seni kekuasaan yang digunakan dalam pemerintahan Prabowo-Gibran dapat dinilai dari perspektif etika politik Islam, sehingga dapat menjadi bahan refleksi untuk menciptakan kebijakan yang lebih seimbang antara efektivitas politik dan tuntutan moral masyarakat.

Penelitian ini juga dapat membantu pengamat politik, masyarakat umum, serta organisasi sosial dalam memahami arah kepemimpinan dan

kebijakan pemerintah melalui pendekatan filosofis yang lebih mendalam, sehingga tidak hanya menilai pemerintah dari sisi teknis atau pragmatis, tetapi juga dari kerangka etika serta prinsip moral.

D. Kerangka Berpikir



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan peta konseptual yang menjadi pemandu logis bagi peneliti dalam menyusun alur penalaran, mulai dari identifikasi masalah, penyusunan landasan teori, hingga sampai pada simpulan penelitian (Sugiyono, 2017). Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan bagaimana dua tradisi pemikiran etika kepemimpinan yang berbeda akar epistemologisnya yakni pemikiran Niccolo Machiavelli yang berbasis realisme politik Barat, dan pemikiran Imam Al-Mawardi yang berbasis fiqh siyasah Islam dapat dipertemukan dalam satu kerangka analitik untuk membaca fenomena

kepemimpinan kontemporer di Indonesia, khususnya pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Penyusunan kerangka berpikir ini penting agar pembaca dapat memahami posisi argumentatif penelitian secara runtut: dari mana masalah penelitian ini bermula, teori apa yang digunakan untuk membedahnya, bagaimana kedua teori tersebut saling berelasi, dan ke arah mana hasil analisis ini diharapkan bermuara.

Setiap bentuk kekuasaan politik senantiasa menghadapi satu pertanyaan klasik yang tidak pernah sepenuhnya terjawab secara final, yaitu apakah kekuasaan harus dijalankan berdasarkan pertimbangan etis, ataukah cukup berdasarkan pertimbangan efektivitas dan hasil. Persoalan ini dikenal dalam filsafat politik sebagai tegangan antara *political realism* dan *political moralism* (Williams, 2005).

Tegangan ini tidak hanya bersifat teoretis, tetapi terus-menerus muncul dalam praktik politik nyata di berbagai negara, termasuk Indonesia, setiap kali seorang pemimpin dihadapkan pada pilihan antara mengambil kebijakan yang populer secara politik namun berisiko etis, atau kebijakan yang etis namun tidak populer.

Dalam konteks inilah, kajian terhadap pemikiran-pemikiran besar tentang etika kepemimpinan menjadi penting, sebab pemikiran tersebut menyediakan kerangka konseptual untuk menilai bukan hanya *apa* yang dilakukan seorang pemimpin, tetapi juga *mengapa* dan *bagaimana* cara pemimpin tersebut bertindak dapat dinilai baik atau buruk secara etis. Penelitian ini memilih dua pemikir besar yang masing-masing berasal dari tradisi peradaban yang berbeda Machiavelli dari peradaban Barat-Renaissans dan Al-Mawardi dari peradaban Islam klasik untuk menunjukkan bahwa persoalan etika kekuasaan adalah persoalan lintas peradaban yang dijawab secara berbeda-beda sesuai dengan akar epistemologis masing-masing tradisi.

Niccolo Machiavelli (1469–1527) menulis *Il Principe* pada tahun 1513 dalam situasi politik Italia yang sangat tidak stabil, ditandai oleh perpecahan negara-kota, invasi asing, dan pengkhianatan politik yang terjadi secara berulang (Skinner, 2000). Konteks historis inilah yang melahirkan corak pemikiran Machiavelli yang sangat pragmatis dan berorientasi pada realitas, bukan idealitas.

Machiavelli berargumen bahwa seorang pemimpin yang hendak bertahan dan berhasil tidak boleh berpedoman pada bagaimana manusia *seharusnya* bertindak, melainkan pada bagaimana manusia *senyatanya* bertindak (Machiavelli, 1998a).

Dua konsep kunci yang menjadi fondasi etika kepemimpinan Machiavelli adalah *virtu* dan *fortuna*. *Virtu* tidak boleh diterjemahkan secara sederhana sebagai “kebajikan” dalam makna moral konvensional, melainkan lebih tepat dipahami sebagai kapasitas, kecakapan, dan keberanian seorang pemimpin dalam mengambil tindakan tegas dan efektif menghadapi ketidakpastian (Muhammad Athla Aditya, 2024). Machiavelli menggambarkan hubungan keduanya secara metaforis: *fortuna* bagaikan sungai yang meluap, dan *virtù* adalah bendungan yang dibangun sebelum musim hujan tiba untuk mengendalikan amukannya.

Dalam pasal yang paling banyak diperdebatkan, Machiavelli mengajukan pertanyaan apakah lebih baik bagi seorang penguasa untuk dicintai atau ditakuti. Jawabannya, idealnya seorang pemimpin memiliki keduanya, namun jika harus memilih salah satu, maka ditakuti lebih aman daripada dicintai, karena cinta rakyat bersifat tidak stabil dan mudah berubah, sedangkan rasa takut yang dilandasi kekuasaan yang sah cenderung lebih dapat dikendalikan oleh pemimpin itu sendiri (Patriano Vano, 2024). Machiavelli kemudian melengkapi prinsip ini dengan simbol singa dan rubah: seorang pemimpin harus memiliki kekuatan singa untuk menakuti serigala (lawan-lawan politik), namun juga harus memiliki kelicikan rubah untuk menghindari jebakan, karena kekuatan tanpa kecerdikan adalah kerapuhan, dan kecerdikan tanpa kekuatan adalah kesia-siaan (Machiavelli, 1998a).

Penting untuk dicatat bahwa interpretasi terhadap Machiavelli tidak boleh berhenti pada kesan permukaan bahwa ia adalah pembela amoralitas politik secara mutlak. Quentin Skinner, salah satu sejarawan pemikiran politik paling otoritatif dalam studi Machiavelli, menunjukkan bahwa Machiavelli sesungguhnya tengah mengkritik kemunafikan elite politik pada masanya yang berpura-pura bermoral di permukaan namun bertindak korup dan oportunistik di belakang layar (Skinner, 2000). Dengan demikian, etika kepemimpinan Machiavelli dapat dipahami sebagai etika konsekuensial yang berorientasi pada keselamatan dan stabilitas negara (*salus rei publicae suprema lex est*), bukan sekadar pembenaran kekerasan tanpa

batas (Hardiman, 2018).

Imam Abu al-Hasan al-Mawardi (974-1058 M) hidup pada masa kemunduran kekuasaan politik Khalifah Abbasiyah, di mana otoritas riil pemerintahan banyak dipegang oleh para panglima militer (*amir*) sementara kekuasaan simbolik tetap berada pada khalifah. Situasi inilah yang melatari penulisan kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah*, yang ditulis untuk merumuskan kembali fondasi teoretis kepemimpinan Islam agar tetap kokoh di tengah fragmentasi kekuasaan riil (Al-Mawardi, 2020).

Bagi Al-Mawardi, imamah (lembaga kepemimpinan tertinggi dalam Islam) bukanlah sekadar instrumen kekuasaan politik, melainkan kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*) yang berfungsi menggantikan peran kenabian dalam dua hal sekaligus: menjaga agama (*hirasat al-din*) dan mengatur urusan dunia (*siyasah al-dunya*) (Muhajir, 2023). Pemimpin dalam kerangka ini bukan sekadar pemegang kuasa politik, melainkan penjaga amanah ilahiah yang kelak dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah (Black, n.d.).

Al-Mawardi merumuskan sejumlah syarat ketat yang harus dipenuhi seorang pemimpin agar layak diberi amanah imamah, di antaranya keadilan yang komprehensif (*al-'adalah*), ilmu yang memungkinkannya berijtihad (*al-'ilm*), kesehatan pancaindra, kesempurnaan fisik, kecakapan manajerial (*al-ra'y*), serta keberanian dan ketegasan (*al-syaja'ah*) dalam membela wilayah dan melawan musuh (Al-Mawardi, 2014). Menariknya, salah satu syarat yang diajukan Al-Mawardi yakni keberanian dan ketegasan menunjukkan adanya titik temu tak terduga dengan konsep *virtu* Machiavelli, meskipun keduanya berangkat dari motif yang sangat berbeda. Al-Mawardi memandangnya sebagai bagian dari ketaatan kepada syariat, sementara Machiavelli memandangnya sebagai instrumen kelangsungan kekuasaan semata.

Selain syarat-syarat personal, Al-Mawardi juga menekankan tiga prinsip operasional dalam menjalankan kekuasaan, yaitu *syura* (musyawarah) sebagai mekanisme pengambilan keputusan, *al-'adl* (keadilan) sebagai tujuan utama kebijakan, dan amanah sebagai etos pertanggungjawaban kekuasaan (Syam, 2017).

Prinsip-prinsip ini menempatkan etika kepemimpinan Al-Mawardi pada kutub yang disebut sebagai etika deontologis-teologis, yakni etika yang menilai benar atau salahnya tindakan seorang pemimpin bukan semata dari hasil yang dicapai, melainkan dari kesesuaiannya dengan ketentuan syariat yang telah ditetapkan terlebih dahulu (Munawir Sjadzali, 1990).

Setelah mengelaborasi kedua pemikiran secara terpisah, langkah berikutnya dalam kerangka berpikir ini adalah mempertemukan keduanya secara komparatif untuk menemukan baik titik temu maupun titik tegang konseptual. Pada tataran epistemologis, perbedaan paling mendasar antara Machiavelli dan Al-Mawardi terletak pada sumber otoritas etika yang mereka rujuk. Machiavelli membangun argumennya dari pengamatan empiris-historis terhadap pola-pola kekuasaan yang berhasil dan gagal sepanjang sejarah Romawi dan Italia Renaisans, sehingga etikanya bersifat induktif dan situasional (Schmandt, 2009). Sebaliknya, Al-Mawardi menempatkan ketaatan kepada syariat dan keadilan sebagai tujuan yang tidak dapat dikompromikan oleh pertimbangan hasil, sehingga etikanya cenderung deontologis: baik buruknya tindakan pemimpin diukur dari kesesuaiannya dengan prinsip yang telah ditetapkan, terlepas dari hasil yang dicapai (Raihanna Aqilah, Nurhikma, 2024).

Meski demikian, kedua pemikiran ini tidak sepenuhnya berseberangan. Keduanya sama-sama lahir dari keprihatinan terhadap kekacauan politik pada zamannya masing-masing dan sama-sama berupaya merumuskan jalan keluar agar kekuasaan tidak jatuh pada kesewenang-wenangan yang merugikan rakyat. Keduanya juga sama-sama menuntut adanya kapasitas, keberanian, dan ketegasan dari seorang pemimpin, meskipun motif yang melandasinya berbeda. Titik temu inilah yang menjadikan perbandingan keduanya bukan sekadar oposisi biner antara “Barat sekuler” melawan “Islam religius”, melainkan dialog antara dua jawaban berbeda atas satu pertanyaan yang sama: bagaimana kekuasaan dapat dijalankan secara bertanggung jawab.

Kerangka konseptual Machiavelli dan Al-Mawardi yang telah dielaborasi di atas selanjutnya digunakan sebagai lensa analisis awal untuk membaca fenomena kepemimpinan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka,

yang dilantik pada 20 Oktober 2024 untuk periode 2024–2029 setelah memperoleh 58,59 persen suara sah nasional pada Pemilihan Umum Presiden 2024. Pemilihan kedua kerangka teori ini bukan tanpa alasan: Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sehingga nilai-nilai etika politik Islam seperti yang dirumuskan Al-Mawardi memiliki resonansi kultural yang kuat dalam wacana publik pada saat yang sama, dinamika politik kekuasaan riil di Indonesia. Mulai dari pembentukan koalisi besar, manuver politik pragmatis, hingga gaya kepemimpinan yang tegas dan berlatar belakang militer juga menampilkan elemen-elemen yang relevan dibaca melalui kerangka realisme Machiavelli (Patriano Vano, 2024).

Beberapa fenomena awal pemerintahan Prabowo-Gibran yang menjadi titik perhatian dalam kerangka berpikir ini meliputi: pembentukan Kabinet Merah Putih yang mengakomodasi hampir seluruh kekuatan politik nasional termasuk partai-partai yang sebelumnya berada di kubu oposisi; program unggulan makan bergizi gratis sebagai instrumen kebijakan populis; retorika persatuan nasional dan visi “Indonesia Emas 2045”; serta proses pencalonan Gibran yang dimungkinkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menurunkan batas usia minimum calon wakil presiden. Fenomena-fenomena ini akan dibaca secara berdampingan melalui dua lensa: dari sudut pandang Machiavelli untuk menilai sejauh mana terdapat elemen pragmatisme kekuasaan, akumulasi dukungan politik, dan kalkulasi strategis dalam pola kepemimpinan tersebut; serta dari sudut pandang Al-Mawardi untuk menilai sejauh mana terdapat elemen keadilan, musyawarah, dan akuntabilitas moral-religius dalam pola kepemimpinan yang sama.

Penting untuk ditegaskan bahwa penelitian ini bersifat *analisis awal*, sehingga tidak dimaksudkan untuk memberikan penilaian final atau menghakimi keberhasilan maupun kegagalan pemerintahan Prabowo-Gibran secara menyeluruh, melainkan untuk menawarkan kerangka baca alternatif yang memperkaya diskursus akademik tentang etika kepemimpinan di Indonesia dengan mempertemukan dua tradisi pemikiran besar yang selama ini jarang didialogkan secara langsung dalam satu kajian.

Secara operasional, kerangka berpikir ini akan dijalankan melalui tiga tahap analisis. Pertama, tahap eksplorasi konseptual, yaitu memetakan secara mendalam prinsip-prinsip etika kepemimpinan dalam pemikiran Machiavelli dan Al-Mawardi melalui kajian pustaka (*library research*) terhadap karya primer dan sekunder kedua pemikir. Kedua, tahap komparasi konseptual, yaitu menyusun kategori-kategori analitik bersama yang dapat digunakan untuk membandingkan kedua pemikiran tersebut secara sistematis, meliputi dimensi sumber legitimasi, orientasi etis, syarat kepemimpinan, dan mekanisme akuntabilitas. Ketiga, tahap aplikasi kontekstual, yaitu menggunakan kategori-kategori analitik yang telah disusun untuk membaca data-data awal mengenai kebijakan, retorika, dan pola kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah terhimpun dari sumber-sumber media, dokumen resmi kenegaraan, dan kajian akademik yang telah terbit.

Melalui tiga tahap ini, kerangka berpikir penelitian bergerak dari yang bersifat abstrak-teoretis menuju yang bersifat konkret-empirik, sehingga pada akhirnya menghasilkan sebuah analisis awal yang argumentatif mengenai bagaimana pola kepemimpinan Prabowo-Gibran dapat dipahami melalui persilangan dua kerangka etika kepemimpinan yang berbeda tradisi, namun sama-sama berbicara tentang tanggung jawab kekuasaan.

Alur logis kerangka berpikir penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: penelitian ini berangkat dari fenomena empirik berupa dinamika awal pemerintahan Prabowo-Gibran yang menimbulkan pertanyaan tentang corak etika kepemimpinan yang mendasarinya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan dua kerangka teoretis yang saling melengkapi, yaitu etika kepemimpinan Machiavelli yang berorientasi pada realisme dan efektivitas kekuasaan, serta etika kepemimpinan Al-Mawardi yang berorientasi pada normativitas syariat dan akuntabilitas moral-religius.

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan penelitian yang komprehensif maka sebelumnya dilakukan sebuah pra penelitian terhadap objek penelitian ini. Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan terhadap beberapa karya ilmiah, tidak ditemukan secara spesifik hal yang membahas tentang “Etika Kepemimpinan Dalam

Pemikiran Niccolo Machiavelli dan Imam Al-Mawardi : Analisis Awal Terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran”, akan tetapi terdapat kajian yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Fitri Meliani Zein, “Kritik Konsep Politik Machiavelli dalam Perspektif Etika Politik Islam (Perbandingan dengan Teori Etika Politik Al-Mawardi)” Tahun 2016. Penelitian ini mengkaji secara komparatif konsep politik Machiavelli dengan menggunakan etika politik Islam, khususnya pemikiran Al-Mawardi, sebagai pisau kritik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep Machiavelli yang memisahkan moralitas dari politik bertentangan secara fundamental dengan etika politik Islam yang menyatukan keduanya dalam bingkai syariat, sehingga kedua pemikiran tersebut berada pada kutub epistemologis yang berbeda dalam memandang relasi antara kekuasaan dan moralitas (Zein, 2016).

2. Mutiara Hardewita, “Praktik Kekuasaan Politik Machiavelli dalam Pemerintahan Presiden Soeharto pada Masa Orde Baru” *Journal of Politics And Democracy* Volume 4, Nomer 2, Tahun 2025. Hasil penelitian dalam jurnal ini menunjukan bahwa konsep kekuasaan yang digagas oleh Niccolo Machiavelli tercermin dalam praktik politik presiden Soeharto pada masa orde baru. Peristiwa pembunuhan massal pasca-1965, penembakan misterius pada 1980-an, serta pembungkaman pers merupakan contoh nyata bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjaga stabilitas dan mengamankan rezim (Hardewita, 2025).

3. Alfin Falah Fahrezy, “Pemikiran Politik Niccolo Machiavelli (Studi Kasus Dinasti Umayyah)” *Living Islam: The Journal of Islamic Discourses* Volume 4, Nomer 2, Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukan bahwa meskipun dinasti ini dianggap kontroversial, dalam kacamata Machiavelli dinasti Umayyah dapat dikatakan ideal dalam hal administratif dan etika kekuasaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengambil kebijakan politik, demi kestabilan pemerintahan, nilai-nilai moral tidak perlu menjadi pertimbangan kecuali dalam rangka yang pragmatis (Alfin Falah Fahrezy, 2021).

4. Muhammad Altha Aditya, “Relevansi Filsafat Politik Niccolo Machiavelli Dengan Prinsip Politik Islam” (2024), Skripsi ini menunjukan bahwa adanya kesesuaian antara beberapa konsep politik Machiavelli dengan Politik

Islam. Misalnya, konsep Machiavelli tentang pentingnya kepemimpinan yang kuat dan keberanian dalam menghadapi tantangan politik sejalan dengan prinsip politik Islam yang menekankan pada pemimpin yang adil dan tegas dalam menjaga stabilitas dan keutuhan negara (Aditya, 2024).

5. Matias Patriano Vano, “Konsep Kekuasaan Menurut Niccolò Machiavelli (Tinjauan Etika Politik atas Pesta Demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024)” *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi* Volume 2, Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak aspek kampanye dan strategi politik kandidat dalam pemilu 2024 yang tidak selaras dan sangat mencerminkan prinsip-prinsip Machiavellian, seperti manipulasi, propaganda, dan penggalangan kekuatan melalui aliansi politik. Tanda bahwa ketidakselarasan diakibatkan karena Presiden (Joko Widodo) kehilangan kewibawaannya karena dianggap kurang mampu menjaga netralitas situasi politik menjelang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia 2024 (Patriano Vano, 2024).

6. Ahmad Fatih Syarofuzzaman, “Dinamika Stabilitas Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Pemikiran Politik Kekuasaan Nicholas Machiavelli” *Jurnal Ilmu Politik* Volume 16, Nomer 1, Tahun 2024. Hasil penelitian menyatakan bahwa konsep kekuasaan Machiavelli dapat kita temukan dengan mudah dari berbagai peristiwa yang terjadi di Indonesia. Misalnya dengan praktik *money politic* sebagai transaksi jual beli suara, bahkan menyewa *Buzzer* sebagai pendukung di sosial media. Dari berbagai kasus tersebut nampaknya sudah menjadi rahasia umum kalau pemikiran Machiavelli diam-diam menjadi praktik politik di negara Indonesia (Syarofuzzaman, 2024).

7. Swastika Aji Ningrum, “Analisis Karakter Kepemimpinan Doflamingo Pada Anime One Piece Arc Dressrosa Perspektif Moralitas Politik Niccolo Machiavelli” (2025), Skripsi ini mengungkapkan bahwa doflamingo bukan sekedar karakter jahat dalam narasi fiksi, melainkan sosok yang merepresentasikan kompleksitas kepemimpinan otoriter yang berakar pada prinsip realisme politik. Representasi Doflamingo sebagai simbol dari penguasa tiranik tidak terlepas dari konteks produksi budaya yang mencerminkan kegelisahan sosial-politik kontemporer, terutama terkait praktik manipulasi kekuasaan yang berakar pada

ketimpangan sistemik. Namun demikian, stabilitas yang dibangun oleh Doflamingo pada akhirnya bersifat ilusi. Ketika ilusi tersebut runtuh akibat terungkapnya kebenaran dan lahirnya perlawanan rakyat yang terorganisir, kekuasaan otoriternya pun tumbang (Ningrum, 2025).

8. Kasman Bakry, Abdul Haris Abbas, Ashar, dan Abdullah Nazhim Hamid “Konsep Kepemimpinan Negara Islam (Studi Komparasi Pemikiran Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah)” *Jurnal Bidang Kajian Islam* volume 7, Nomer 1, Tahun 2021. Penelitian ini membandingkan pemikiran kepemimpinan negara Islam menurut Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa keduanya sepakat pada prinsip dasar keadilan dan ketaatan syariat, namun berbeda dalam mekanisme pengangkatan pemimpin dan batas ketaatan rakyat terhadap penguasa yang dianggap zalim (Bakry et al., 2021).

9. Safriadi Nurdin dan Marzuki, “Analisis Komparatif tentang Kriteria Kepala Negara Menurut Imam Al-Mawardi dan Imam Al-Ghazali” *Jurnal Ilmiah Ma’had Aly Raudhatul Ma’rif* Volume 1, Nomer 2, Tahun 2023. Penelitian ini menemukan bahwa Al-Mawardi merumuskan tujuh kriteria spesifik bagi seorang kepala negara, yaitu adil, berilmu, sehat pancaindra dan fisik, visioner, berani, serta keturunan Quraisy, sementara Al-Ghazali lebih menekankan dimensi moral-spiritual dan keterpilihan oleh rakyat sebagai basis legitimasi kepemimpinan (Nurdin & Marzuki Marzuki, 2023).

10. Alwi Dahlan Ritonga dan Fernanda Putra Adela, “Mencermati Populisme Prabowo Sebagai Bentuk Gaya Diskursif Saat Kampanye Politik Pada Pemilihan Presiden 2019” *Politeia : Jurnal Ilmu Politik* Volume 12, nomor 1, Tahun 2020. Hasil penelitian menemukan bahwa Prabowo memang menjadikan populisme sebagai bentuk discursive style atau gaya retorika, bukan sebagai ideologi politik yang konsisten. Pada elemen pertama, Prabowo secara tegas dan eksplisit menyuarakan pembelaan terhadap rakyat dan perlawanan terhadap elite melalui berbagai ungkapan emosional dalam pidato kampanyenya. Namun pada elemen kedua, yaitu eksklusi terhadap kelompok lain, Prabowo terlihat tidak berani bersikap eksplisit dan cenderung tidak konsisten, terutama terkait isu "antek asing", sehingga sikap eksklusionernya lebih banyak ditemukan pada para pendukungnya

ketimbang pada diri Prabowo secara langsung. Temuan ini diperkuat dengan fakta bahwa masuknya Prabowo ke dalam kabinet Jokowi periode kedua semakin menegaskan bahwa populisme yang ia mainkan hanya sebatas gaya retorika untuk menarik simpati publik, bukan landasan ideologis yang ia pegang secara konsisten (Ritonga, 2020).

Berdasarkan pemetaan terhadap penelitian terdahulu tampak bahwa sebagian besar penelitian tersebut belum menelaah fenomena pemerintahan ini melalui kerangka filosofis-politik yang bersifat *comparative normative*, khususnya yang mengaitkan antara pemikiran politik klasik Barat dan prinsip politik Islam.

Selain itu, penelitian terdahulu juga cenderung berada pada tingkat konseptual membahas teori kekuasaan, legitimasi, dan stabilitas dalam perspektif masing-masing tokoh tetapi belum mengaitkannya secara langsung dengan praktik pemerintahan Prabowo-Gibran sebagai sebuah fenomena politik yang masih berkembang. Padahal, pemerintahan ini menghadirkan kebijakan politik yang unik, seperti koalisi besar, pendekatan keamanan melalui bela negara, serta orientasi pembangunan yang pragmatis, yang membutuhkan kerangka analisis multidimensi.

Di sinilah letak celah penelitian (*research gap*) yang berusaha diisi oleh skripsi ini. Penelitian ini menawarkan pendekatan komparatif-analitis yang menggabungkan dua sistem pemikiran politik yang berbeda yaitu Niccolo Machiavelli dan Imam Al-Mawardi untuk membaca karakter kekuasaan dan kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran. Pendekatan ini belum banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, sehingga memberikan kontribusi baru dalam bentuk sintesis teoretis maupun interpretasi praktis terhadap fenomena politik Indonesia terkini.

Dengan demikian, posisi unik penelitian ini terletak pada upaya menghadirkan dialog kritis antara dua tradisi pemikiran politik yang sering dipertentangkan politik realis Machiavelli dan politik etis normatif Al-Mawardi untuk menilai strategi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam membangun stabilitas dan legitimasi. Pendekatan ini tidak hanya memperkaya perspektif analisis, tetapi juga menawarkan bentuk relevansi baru yang dapat dijadikan rujukan dalam memahami praktik kekuasaan di Indonesia pada era kontemporer